



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.284, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Tunjangan
Profesi Guru. Daerah. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/PMK.07/2010

TENTANG

**PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA TUNJANGAN
PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

9. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kuota Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009.
- (2) Total alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dalam APBN Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp10.994.892.500.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 adalah merupakan komponen Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- (2) Tunjangan Profesi Guru PNSD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Profesi Guru PNSD disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah).

- (2) Rincian Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD untuk masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alokasi sementara untuk Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dilakukan secara semesteran (enam bulanan), yaitu:
 - a. Semester Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilakukan pada bulan Juni 2010; dan
 - b. Semester Kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilakukan pada bulan November 2010.
- (3) Penyaluran Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari alokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Penyaluran Semester Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar selisih antara penetapan alokasi prognosa definitif Tunjangan Profesi Guru PNSD dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Alokasi prognosa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan pada bulan Oktober 2010.
- (6) Penyaluran Semester Kedua dapat dilaksanakan setelah Laporan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD Semester Pertama disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan melampirkan *copy* Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

Pasal 5

- (1) Daftar perhitungan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dibuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan.

- (2) Tunjangan Profesi Guru PNSD tidak termasuk untuk bulan ke-13.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membayarkan Tunjangan Profesi kepada masing-masing Guru PNSD paling lambat, yaitu:
 - a. Semester Pertama pada bulan Juli 2010; dan
 - b. Semester Kedua pada bulan Desember 2010.
- (4) Pembayaran Tunjangan Profesi kepada masing-masing Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15% (lima belas persen) bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan realisasi pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD paling lambat, yaitu:
 - a. Semester Pertama pada akhir bulan Agustus 2010; dan
 - b. Semester Kedua pada akhir bulan Januari 2011.
- (2) Laporan Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi pembayaran dan kekurangan dana, jika terdapat selisih kurang antara jumlah dana yang di transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan jumlah realisasi pembayaran Tunjangan Profesi kepada masing-masing Guru PNSD;
 - b. Laporan Realisasi pembayaran dan kelebihan dana, jika terdapat selisih lebih antara jumlah dana yang di transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan jumlah realisasi pembayaran Tunjangan Profesi kepada masing-masing Guru PNSD;
 - c. Laporan Realisasi pembayaran dibuat secara Semester dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan
 - d. Penyampaian Laporan Realisasi pembayaran yang disampaikan harus disertai dengan *Copy* Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Laporan Realisasi Semester Pertama terdapat selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ataupun selisih lebih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, maka selisih kurang ataupun selisih lebih tersebut akan diperhitungkan dalam penetapan alokasi prognosa definitif Tunjangan Profesi Guru PNSD setelah memperhatikan usulan dari Kementerian Pendidikan Nasional.

- (2) Dalam hal Laporan Realisasi Semester Kedua terdapat selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ataupun selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, maka terhadap selisih kurang ataupun selisih lebih tersebut akan diperhitungkan dalam penetapan alokasi sementara tahun anggaran berikutnya setelah memperhatikan usulan dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

NO	DAERAH	JUMLAH
33	Kab. Nias	1.966.183.200
34	Kab. Simalungun	31.878.750.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	3.671.762.400
36	Kab. Tapanuli Tengah	11.008.281.600
37	Kab. Tapanuli Utara	15.157.720.800
38	Kab. Toba Samosir	11.415.164.400
39	Kota Binjai	16.871.386.800
40	Kota Medan	45.016.934.400
41	Kota Pematang Siantar	19.358.445.600
42	Kota Sibolga	7.139.439.600
43	Kota Tanjung Balai	3.366.458.400
44	Kota Tebing Tinggi	11.587.999.200
45	Kota Padang Sidempuan	15.451.843.200
46	Kab. Pakpak Bharat	1.393.857.600
47	Kab. Nias Selatan	357.901.200
48	Kab. Humbang Hasundutan	10.351.177.200
49	Kab. Serdang Bedagai	19.416.014.400
50	Kab. Samosir	7.283.011.200
51	Kab. Batubara	10.762.354.800
52	Kab. Labuhan Batu Utara	8.796.503.400
53	Kab. Labuhan Batu Selatan	5.924.278.800
54	Kab. Padang Lawas Utara	403.992.000
55	Kab. Padang Lawas	1.970.287.200
56	Kab. Nias Utara	1.033.392.000
57	Kab. Nias Barat	681.223.200
58	Kota Gunung Sitoli	5.167.839.600
59	Provinsi Sumatera Barat	-
60	Kab. Limapuluh Kota	20.285.254.800
61	Kab. Agam	26.293.491.600
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2.559.420.000
63	Kab. Padang Pariaman	26.742.738.000
64	Kab. Pasaman	15.232.035.600
65	Kab. Pesisir Selatan	26.173.704.000
66	Kab. Sijunjung	11.656.927.200
67	Kab. Solok	25.248.750.000

NO	DAERAH	JUMLAH
68	Kab. Tanah Datar	34.155.487,200
69	Kota Bukit Tinggi	7.753.840,800
70	Kota Padang Panjang	7.565.594,400
71	Kota Padang	41.835.331,200
72	Kota Payakumbuh	9.788.413,200
73	Kota Sawahlunto	7.084.179,600
74	Kota Solok	8.147.121,600
75	Kota Pariaman	12.237.308,400
76	Kab. Pasaman Barat	11.518.744,800
77	Kab. Dharmasraya	7.680.631,200
78	Kab. Solok Selatan	6.364.815,600
79	Provinsi Riau	-
80	Kab. Bengkalis	19.210.131,600
81	Kab. Indragiri Hilir	15.327.826,800
82	Kab. Indragiri Hulu	16.325.145,600
83	Kab. Kampar	25.316.563,200
84	Kab. Kuantan Singingi	15.479.431,200
85	Kab. Pelalawan	10.762.266,800
86	Kab. Rokan Hilir	8.956.879,200
87	Kab. Rokan Hulu	12.138.147,600
88	Kab. Siak	11.135.464,800
89	Kota Dumai	11.027.164,800
90	Kota Pekanbaru	39.438.162,000
91	Kab. Kepulauan Meranti	4.968.880,800
92	Provinsi Kepulauan Riau	-
93	Kab. Bintan	3.236.130,000
94	Kab. Natuna	769.366,800
95	Kab. Karimun	6.287.658,800
96	Kota Batam	4.046.356,800
97	Kota Tanjung Pinang	3.850.404,000
98	Kab. Lingga	1.063.251,600
99	Kab. Kepulauan Anambas	85.081,800

NO	DAIRAH	JUMLAH
100	Provinsi Jambi	-
101	Kab. Batanghari	13.917.382.881
102	Kab. Bungo	13.451.071.200
103	Kab. Kerinci	14.116.969.200
104	Kab. Merangin	7.731.291.000
105	Kab. Muaro Jambi	14.315.973.600
106	Kab. Sarolangun	7.025.817.600
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	11.093.135.200
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.330.944.400
109	Kab. Tebo	7.533.705.600
110	Kota Jambi	33.879.656.400
111	Kota Sungai Penuh	9.251.562.000
112	Provinsi Sumatera Selatan	-
113	Kab. Lahat	12.231.189.400
114	Kab. Musi Banyuasin	9.112.045.200
115	Kab. Musi Rawas	15.532.676.400
116	Kab. Muara Enim	7.389.343.200
117	Kab. Ogan Komering Ilir	21.003.614.400
118	Kab. Ogan Komering Ulu	18.305.761.200
119	Kota Palembang	55.230.331.200
120	Kota Pagar Alam	2.625.698.400
121	Kota Lubuk Linggau	9.607.913.200
122	Kota Prabumulih	7.664.201.200
123	Kab. Banyuasin	13.361.412.000
124	Kab. Ogan Ilir	5.782.346.400
125	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	7.107.014.400
126	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.410.615.600
127	Kab. Empat Lawang	1.919.362.800
128	Provinsi Bangka Belitung	-
129	Kab. Bangka	8.752.633.200
130	Kab. Belitung	5.446.916.000
131	Kota Pangkal Pinang	8.581.728.000
132	Kab. Bangka Selatan	3.111.516.000
133	Kab. Bangka Tengah	2.877.319.200

NO	DAERAH	JUMLAH
134	Kab. Bangka Barat	4.599.621.600
135	Kab. Belitung Timur	3.999.613.200
136	Provinsi Bengkulu	-
137	Kab. Bengkulu Selatan	12.903.937.200
138	Kab. Bengkulu Utara	10.189.617.600
139	Kab. Rejang Lebong	12.918.973.200
140	Kota Bengkulu	15.511.071.000
141	Kab. Kaur	3.690.244.800
142	Kab. Seluma	6.013.466.400
143	Kab. Mukomuko	8.732.646.800
144	Kab. Lebong	3.607.212.000
145	Kab. Kepahiang	4.468.548.800
146	Kab. Bengkulu Tengah	3.977.022.000
147	Provinsi Lampung	-
148	Kab. Lampung Barat	20.484.148.800
149	Kab. Lampung Selatan	36.062.545.200
150	Kab. Lampung Tengah	76.062.459.600
151	Kab. Lampung Utara	26.729.749.200
152	Kab. Lampung Timur	58.686.496.800
153	Kab. Tanggamus	76.283.924.000
154	Kab. Tulang Bawang	11.187.872.400
155	Kab. Way Kanan	15.580.522.800
156	Kota Bandar Lampung	73.063.852.800
157	Kota Metro	24.327.652.800
158	Kab. Pesawaran	23.722.843.200
159	Kab. Pringsewu	30.174.262.800
160	Kab. Tulang Bawang Barat	12.232.526.400
161	Kab. Mesuji	3.111.620.400
162	Provinsi DKI Jakarta	447.570.978.000
163	Provinsi Jawa Barat	-
164	Kab. Bandung	137.353.708.400
165	Kab. Bekasi	25.873.253.200

NO	DAERAH	JUMLAH
166	Kab. Bogor	63.593.890.800
167	Kab. Ciamis	68.284.118.400
168	Kab. Cianjur	69.435.152.400
169	Kab. Cirebon	72.453.936.000
170	Kab. Garut	100.804.653.600
171	Kab. Indramayu	36.790.453.200
172	Kab. Karawang	59.196.668.400
173	Kab. Kuningan	47.245.631.100
174	Kab. Majalengka	67.827.297.600
175	Kab. Purwakarta	31.810.106.400
176	Kab. Subang	46.574.214.000
177	Kab. Sukabumi	68.434.362.000
178	Kab. Sumedang	44.267.115.600
179	Kab. Tasikmalaya	93.033.297.200
180	Kota Bandung	84.446.253.600
181	Kota Bekasi	53.780.448.000
182	Kota Bogor	46.236.871.200
183	Kota Cirebon	22.266.876.000
184	Kota Depok	29.238.686.000
185	Kota Sukabumi	24.618.668.400
186	Kota Cimahi	25.236.337.600
187	Kota Tasikmalaya	56.089.293.600
188	Kota Banjar	11.507.508.000
189	Kab. Bandung Barat	48.012.196.800
190	Provinsi Banten	-
191	Kab. Lebak	49.160.241.600
192	Kab. Pandeglang	61.350.922.800
193	Kab. Serang	41.794.656.000
194	Kab. Tangerang	61.084.530.000
195	Kota Cilegon	17.776.024.800
196	Kota Tangerang	63.800.539.600
197	Kota Serang	22.091.735.200
198	Kota Tangerang Selatan	29.885.047.200

NO	DAIRAH	JUMLAH
199	Provinsi Jawa Tengah	-
200	Kab. Banjarnegara	42.303.064.800
201	Kab. Banyumas	79.850.713.200
202	Kab. Batang	42.118.724.400
203	Kab. Blora	47.016.289.200
204	Kab. Boyolali	56.720.996.100
205	Kab. Brebes	55.118.265.600
206	Kab. Cilacap	65.228.070.000
207	Kab. Demak	44.777.300.000
208	Kab. Grobogan	43.764.060.000
209	Kab. Jepara	30.758.192.400
210	Kab. Karanganyar	57.217.404.000
211	Kab. Kebumen	51.710.332.000
212	Kab. Kendal	41.734.042.800
213	Kab. Klaten	68.344.035.600
214	Kab. Kudus	27.308.022.000
215	Kab. Magelang	42.223.194.000
216	Kab. Pati	52.141.941.600
217	Kab. Pekalongan	32.101.348.800
218	Kab. Pemalang	43.118.467.200
219	Kab. Purbalingga	36.476.406.000
220	Kab. Purworejo	46.162.670.400
221	Kab. Rembang	29.255.924.400
222	Kab. Semarang	49.926.075.600
223	Kab. Sragen	54.488.178.000
224	Kab. Sukoharjo	39.149.032.800
225	Kab. Tegal	35.944.554.000
226	Kab. Temanggung	28.863.778.800
227	Kab. Wonogiri	61.148.122.800
228	Kab. Wonosobo	29.887.182.000
229	Kota Magelang	15.942.478.800
230	Kota Pekalongan	16.393.460.400
231	Kota Salatiga	16.235.876.400
232	Kota Semarang	64.940.774.400
233	Kota Surakarta	71.159.206.400
234	Kota Tegal	20.185.354.800

NO	DAERAH	JUMLAH
235	Provinsi D.I. Yogyakarta	-
236	Kab. Bantul	76.643.037,600
237	Kab. Gunung Kidul	47.770.596,000
238	Kab. Kulon Progo	41.520.764,400
239	Kab. Sleman	70.581.294,000
240	Kota Yogyakarta	55.707.186,000
241	Provinsi Jawa Timur	-
242	Kab. Bangkalan	43.079.449,200
243	Kab. Banyuwangi	33.593.781,600
244	Kab. Blitar	82.885.380,000
245	Kab. Bojonegoro	87.570.483,600
246	Kab. Bondowoso	34.978.942,800
247	Kab. Gresik	69.567.394,000
248	Kab. Jember	84.949.929,600
249	Kab. Jombang	64.219.230,000
250	Kab. Kediri	81.851.293,200
251	Kab. Lamongan	102.900.468,000
252	Kab. Lumajang	53.740.968,000
253	Kab. Madiun	60.645.445,200
254	Kab. Magetan	46.078.950,000
255	Kab. Malang	131.553.733,600
256	Kab. Mojokerto	51.122.151,600
257	Kab. Nganjuk	72.154.624,800
258	Kab. Ngawi	70.234.675,200
259	Kab. Pacitan	43.640.354,800
260	Kab. Pamekasan	23.374.136,400
261	Kab. Pasuruan	92.963.824,800
262	Kab. Ponorogo	66.311.581,400
263	Kab. Probolinggo	57.176.385,600
264	Kab. Sampang	26.200.347,600
265	Kab. Sidoarjo	91.167.934,800
266	Kab. Situbondo	24.892.924,800
267	Kab. Sumenep	34.481.596,800
268	Kab. Tumpang	67.969.970,400
269	Kab. Tuban	78.781.074,000

NO	DAERAH	JUMLAH
270	Kab. Tulungagung	44.330.479,200
271	Kota Blitar	19.979.239,200
272	Kota Kediri	32.830.896,000
273	Kota Madiun	31.051.225,200
274	Kota Malang	68.978.883,600
275	Kota Mojokerto	12.403.388,800
276	Kota Pasuruan	17.339.152,800
277	Kota Probolinggo	22.588.537,200
278	Kota Surabaya	182.755.136,800
279	Kota Batu	13.576.953,200
280	Provinsi Kalimantan Barat	-
281	Kab. Bengkayang	3.342.373,600
282	Kab. Landak	8.993.170,800
283	Kab. Kapuas Hulu	8.730.342,000
284	Kab. Ketapang	11.739.236,400
285	Kab. Pontianak	12.001.044,000
286	Kab. Sambas	18.718.977,600
287	Kab. Sanggau	11.408.135,600
288	Kab. Sintang	12.149.388,800
289	Kota Pontianak	36.191.293,200
290	Kota Singkawang	10.895.637,800
291	Kab. Sekadau	3.520.987,600
292	Kab. Melawi	3.714.806,400
293	Kab. Kayong Utara	5.322.717,600
294	Kab. Kubu Raya	18.661.838,000
295	Provinsi Kalimantan Tengah	-
296	Kab. Barito Selatan	7.240.102,800
297	Kab. Barito Utara	5.751.378,000
298	Kab. Kapuas	19.128.271,800
299	Kab. Kotawaringin Barat	5.951.088,000
300	Kab. Kotawaringin Timur	10.772.763,600
301	Kota Palangkaraya	26.217.410,400
302	Kab. Barito Timur	3.580.624,000
303	Kab. Murung Raya	3.281.596,800

NO	DAIRAH	JUMLAH
304	Kab. Pulang Pisau	3.306.357.600
305	Kab. Gunung Mas	3.308.821.000
306	Kab. Lamandau	2.575.770.000
307	Kab. Sukamara	1.445.826.000
308	Kab. Katingan	5.793.559.200
309	Kab. Seruyan	2.642.080.800
310	Provinsi Kalimantan Selatan	-
311	Kab. Banjar	19.215.570.000
312	Kab. Barito Kuala	15.463.165.200
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	10.912.507.200
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	10.607.563.200
315	Kab. Hulu Sungai Utara	7.633.591.200
316	Kab. Kotabaru	7.913.959.200
317	Kab. Tabalong	12.812.191.200
318	Kab. Tanah Laut	11.694.415.200
319	Kab. Tapin	8.052.634.800
320	Kota Banjarbaru	12.932.493.600
321	Kota Banjarmasin	37.905.880.800
322	Kab. Balangan	2.736.237.600
323	Kab. Tanah Bumbu	6.525.033.600
324	Provinsi Kalimantan Timur	-
325	Kab. Berau	4.375.851.600
326	Kab. Bulungan	5.290.125.600
327	Kab. Kutai Kartanegara	13.217.901.600
328	Kab. Kutai Barat	3.334.718.400
329	Kab. Kutai Timur	6.521.919.600
330	Kab. Mahinaw	685.228.800
331	Kab. Nunukan	3.153.921.200
332	Kab. Paser	9.118.899.600
333	Kota Balikpapan	18.182.529.200
334	Kota Bontung	7.061.685.200
335	Kota Samarinda	28.534.953.200
336	Kota Tarakan	6.741.158.400
337	Kab. Penajam Paser Utara	4.247.486.400
338	Kab. Tana Tidung	-

NO	DAERAH	JUMLAH
339	Provinsi Sulawesi Utara	-
340	Kab. Bolaang Mongondow	5.594.187.600
341	Kab. Minahasa	22.418.340.000
342	Kab. Sangihe	9.887.686.800
343	Kota Bitung	8.333.066.000
344	Kota Manado	23.947.581.600
345	Kab. Kepulauan Talaud	3.616.301.200
346	Kab. Minahasa Selatan	17.786.353.200
347	Kota Tomohon	7.815.709.200
348	Kab. Minahasa Utara	10.746.640.800
349	Kota Kotamobagu	11.583.895.200
350	Kab. Bolaang Mongondow Utara	352.598.400
351	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Baro	4.371.560.400
352	Kab. Minahasa Tenggara	4.912.653.600
353	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.162.102.800
354	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	880.092.000
355	Provinsi Gorontalo	-
356	Kab. Boalemo	6.347.764.000
357	Kab. Gorontalo	25.685.066.400
358	Kota Gorontalo	25.207.597.200
359	Kab. Pohuwato	4.208.762.400
360	Kab. Bone Bolango	11.231.343.600
361	Kab. Gorontalo Utara	1.106.679.600
362	Provinsi Sulawesi Tengah	-
363	Kab. Banggai	21.636.237.600
364	Kab. Banggai Kepulauan	9.972.798.000
365	Kab. Buol	5.011.447.200
366	Kab. Toli-Toli	9.708.577.200
367	Kab. Donggala	13.587.439.200
368	Kab. Morowali	9.291.469.200
369	Kab. Poso	14.177.611.200
370	Kota Palu	35.593.916.400
371	Kab. Parigi Moutong	15.447.001.200
372	Kab. Tojo Una-Una	8.835.268.400
373	Kab. Sigi	13.715.311.200

NO	DAERAH	JUMLAH
374	Provinsi Sulawesi Selatan	-
375	Kab. Bantaeng	16.098.944.400
376	Kab. Barru	21.209.937.600
377	Kab. Bone	55.551.912.000
378	Kab. Bulukumba	29.628.126.000
379	Kab. Enrekang	23.595.510.000
380	Kab. Gowa	34.922.856.000
381	Kab. Jeneponto	21.883.929.600
382	Kab. Luwu	24.061.321.200
383	Kab. Luwu Utara	10.100.845.200
384	Kab. Maros	25.545.489.600
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	29.219.409.600
386	Kab. Pinrang	25.051.545.600
387	Kab. Kepulauan Selayar	10.747.674.000
388	Kab. Sidenreng Rappang	28.113.664.800
389	Kab. Sinjai	25.680.583.200
390	Kab. Soppeng	29.943.434.400
391	Kab. Takalar	15.279.506.400
392	Kab. Tana Toraja	19.677.152.400
393	Kab. Wajo	38.317.724.400
394	Kota Pare Pare	19.515.037.200
395	Kota Makassar	86.278.579.200
396	Kota Palopo	20.407.149.600
397	Kab. Luwu Timur	12.073.232.400
398	Kab. Toraja Utara	11.820.177.600
399	Provinsi Sulawesi Barat	-
400	Kab. Majene	14.922.733.200
401	Kab. Mamuju	17.755.478.400
402	Kab. Polewali Mandar	26.703.844.800
403	Kab. Mamasa	4.502.511.600
404	Kab. Mamuju Utara	2.769.642.000
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	-
406	Kab. Buton	12.309.320.400
407	Kab. Konawe	14.143.104.000

NO	DAERAH	JUMTAH
408	Kab. Kolaka	14.854.261.200
409	Kab. Muna	19.676.180.400
410	Kota Kendari	19.850.810.000
411	Kota Baubau	12.044.941.200
412	Kab. Konawe Selatan	10.761.736.800
413	Kab. Bombana	4.177.284.000
414	Kab. Wakatobi	3.890.041.200
415	Kab. Kolaka Utara	1.985.474.400
416	Kab. Konawe Utara	858.756.000
417	Kab. Buton Utara	1.211.592.000
418	Provinsi Bali	-
419	Kab. Badung	32.231.437.200
420	Kab. Bangli	17.984.224.800
421	Kab. Buleleng	57.389.756.400
422	Kab. Gianyar	36.966.446.400
423	Kab. Jembrana	23.202.200.400
424	Kab. Karangasem	32.792.643.600
425	Kab. Klungkung	17.127.124.800
426	Kab. Tabanan	39.632.849.200
427	Kota Denpasar	42.030.685.600
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-
429	Kab. Bima	36.036.592.800
430	Kab. Dompu	15.817.551.600
431	Kab. Lombok Barat	35.318.450.400
432	Kab. Lombok Tengah	46.968.066.000
433	Kab. Lombok Timur	46.095.428.400
434	Kab. Sumbawa	27.452.654.400
435	Kota Mataram	30.106.676.400
436	Kota Bima	21.610.839.600
437	Kab. Sumbawa Barat	8.132.347.600
438	Kab. Lingsok Utara	9.427.506.000
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-
440	Kab. Alor	4.548.120.000

NO	DAERAH	JUMLAH
441	Kab. Belu	7.760.582.400
442	Kab. Ende	9.138.300.000
443	Kab. Flores Timur	6.190.700.400
444	Kab. Kupang	11.816.739.600
445	Kab. Lembata	3.553.975.600
446	Kab. Manggarai	7.151.188.800
447	Kab. Ngada	3.837.699.600
448	Kab. Sikka	6.640.441.200
449	Kab. Sumba Barat	3.241.692.000
450	Kab. Sumba Timur	5.939.456.400
451	Kab. Timor Tengah Selatan	8.628.014.400
452	Kab. Timor Tengah Utara	5.797.303.200
453	Kota Kupang	24.628.827.600
454	Kab. Rote Ndao	3.741.586.800
455	Kab. Manggarai Barat	2.169.811.200
456	Kab. Nagekeo	2.315.289.600
457	Kab. Sumba Barat Daya	4.280.306.400
458	Kab. Sumba Tengah	608.109.600
459	Kab. Manggarai Timur	2.966.978.400
460	Kab. Sabu Raijua	1.675.938.000
461	Provinsi Maluku	-
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	2.289.037.200
463	Kab. Maluku Tengah	13.082.254.800
464	Kab. Maluku Tenggara	3.774.716.400
465	Kab. Buru	5.259.717.800
466	Kota Ambon	30.109.334.400
467	Kab. Seram Bagian Barat	3.460.954.800
468	Kab. Seram Bagian Timur	485.027.200
469	Kab. Kepulauan Aru	1.522.748.400
470	Kota Tual	2.120.472.000
471	Kab. Buru Selatan	482.785.200
472	Kab. Maluku Barat Daya	790.293.600
473	Provinsi Maluku Utara	-
474	Kab. Halmahera Tengah	1.202.601.600

NO	DAERAH	JLMIAH
475	Kab. Halmahera Barat	1.068.022.800
476	Kota Ternate	12.160.312.800
477	Kab. Halmahera Timur	1.113.070.800
478	Kota Tidore Kepulauan	6.666.666.000
479	Kab. Kepulauan Sula	1.967.017.200
480	Kab. Halmahera Selatan	2.566.360.800
481	Kab. Halmahera Utara	3.509.131.200
482	Kab. Pulau Morotai	310.107.600
483	Provinsi Papua	-
484	Kab. Biek Numfor	3.057.976.800
485	Kab. Jayapura	8.329.345.200
486	Kab. Jayawijaya	2.325.201.600
487	Kab. Merauke	13.625.032.800
488	Kab. Mimika	1.134.286.800
489	Kab. Nabire	6.140.733.600
490	Kab. Paniai	630.668.400
491	Kab. Puncak Jaya	470.762.400
492	Kab. Kepulauan Yapen	3.321.568.600
493	Kota Jayapura	19.766.802.000
494	Kab. Sarmi	434.853.600
495	Kab. Keerom	2.573.669.200
496	Kab. Yahukimo	-
497	Kab. Pegunungan Bintang	54.643.200
498	Kab. Tolikara	-
499	Kab. Boven Digoel	31.372.800
500	Kab. Mappi	446.148.000
501	Kab. Asmat	210.147.600
502	Kab. Waropen	704.445.600
503	Kab. Supiori	58.934.000
504	Kab. Mamberamo Raya	-
505	Kab. Mamberamo Tengah	-
506	Kab. Yalimo	-
507	Kab. Lanny Jaya	-
508	Kab. Nduga	-
509	Kab. Puncak	-

NO	DAERAH	JUMLAH
510	Kab. Dogiyai	113.134.800
511	Kab. Intan Jaya	-
512	Kab. Deiyai	-
513	Provinsi Papua Barat	-
514	Kab. Sorong	4.632.069.600
515	Kab. Manokwari	7.282.802.400
516	Kab. Fakfak	3.015.264.000
517	Kota Sorong	10.547.014.400
518	Kab. Sorong Selatan	1.412.769.600
519	Kab. Raja Ampat	553.880.400
520	Kab. Teluk Bintuni	685.315.200
521	Kab. Teluk Wondama	98.881.800
522	Kab. Kaimana	1.381.703.200
523	Kab. Tambora	-
524	Kab. Maybrat	-
TOTAL PROVINSI		447.571.978.000
TOTAL KABUPATEN/KOTA		10.547.321.522.000
TOTAL NASIONAL		10.994.892.300.000

MENTERI KEUANGAN

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEDUKURAN
KOMOR /JMK/07200 TENTANG
KELOMPOK UMLM DAN ALKAFASI
KELOMPOK TUNJANGAN
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KABUPATEN KAROLIN/ KOTA TAMBON
ANGGARAN 2010

LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN 2010 DAN KELEBIHAN/KEKURANGAN DANA *)

GURU YANG MENERIMA TUNJANGAN PROFESI		Jenjang Pendidikan			Jumlah
	TK&SD	SMP	SMK & SMK		
Guru PNS Daerah:					
a. PNS (orang)	x1	y1	z1		$\Sigma (x+y+z)$
b. CPNS (orang)	x2	y2	z2		$\Sigma (x+y+z)$
Jumlah Guru PNSD	Σx	Σy	Σz		$\Sigma x+y+z$
REALISASI PEMBAYARAN KEPADA:					
Jumlah Guru yang TERBAYAR (orang)	a	b	c		a+b+c
Jumlah Bulan Terbayar	bulan	bulan	bulan		
Jumlah (2) Guru yang BELUM TERBAYAR (orang)	$\Sigma x - a$	$\Sigma y - b$	$\Sigma z - c$		$\Sigma (x+y+z) - (a+b+c)$
Jumlah Bulan Belum terbayar	bulan	bulan	bulan		
Paga Dana dalam PMK	Realisasi Pembayaran s.d. Caturwulan sebelumnya			Penggunaan IVK Dasar 2) ***	Keterangan ****)
(1)	(?)	(2)	(3)	(5)	(6)
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	

Keterangan :

*) --- Tidak salah

**) --- Baik yang lebih bayar / kurang bayar (dalam terjemah) harus mencantumkan sebagai laporan.

***) --- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

****) --- Dapat ditambahkan ketetapan yang menyebabkan ataupun kekurangan dana dimaksud.

Tempat, 2010

Kepala Daerah

Ttd

Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D. W. MARTOWARDJO